



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 432 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah, tertib administrasi dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu menunjuk dan mengangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216);
17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas dan wewenang serta menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang :
- a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
 - c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kakan, Kabag dan
Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
 2. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 432 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 30 Desember 2022

DAFTAR BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Dinas/Instansi	Nama/NIP	Jabatan
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT DAERAH:	a. LENI YUNIARTI 19781126 200701 2 011 b. HAFIT THAIB SIRI, S.E 19800527 200312 1 007	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
2	SEKRETARIAT DPRD	SUHARNI 19731009 200701 2 010	Bendahara Pengeluaran
3	RSUD Dr. SOEROTO:	a. ANGGARANI DEWI LUKITASARI, A.Md 19840920 201001 1 029 b. SEPTI FRIDA MUGI LESTARI, SE 19770909 199803 2 002	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
4	INSPEKTORAT	IRWIANTI DWI RETNANI 19771020 200801 2 016	Bendahara Pengeluaran
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	TINA LUKAS WIJAYANTI, SE 19850218 200901 2 007	Bendahara Pengeluaran
6	BADAN KEUANGAN:	a. MAELANI SETIYO CAHYANDARI, SH 19780523 199803 2 004 b. SUGIYANTI 19730510 200701 2 020	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	JUJUK AVANGKI, S.Hut 19801115 200701 1 006	Bendahara Pengeluaran
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	NURISTA FITRIA AGUSTINA 19810801 201001 2 003	Bendahara Pengeluaran
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN:	a. NUUR ROHMAT FAJAR RIYANTO 19770110 200901 1 004 b. WASIS PUJIANTO 19820309 200701 1 001	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
10	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA:	a. WAHYU HANDAYANI 19710610 200701 2 013 b. SRI LESTARI 19861013 201001 2 002	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	HARI PURNAWAN 19780719 200901 1 005	Bendahara Pengeluaran
12	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA:	a. AGUSTIN ERNA MARDININGTYAS, SE 19810429 201001 2 002 b. DIAN PRANITHA 19840925 200901 2 003	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH:	a. RUSTAM EFENDY 19850715 200901 1 007 b. SUCI HANDAYANI 19801027 201001 2 002	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG:	a. WELLY SUKENDRA 19730123 201001 1 002 b. NUNIK EKO INDARWATI, SE 19790228 201001 2 015	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4
15	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN:	a. PARTINI, SE 19810715 201101 2 013 b. DANANG EKO PRASETYO, SE 19880722 201101 1 009	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	LATIFATUL KHOIRIYAH, SE 19741102 201001 2 001	Bendahara Pengeluaran
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU:	a. ENY INDAH PURWATI, A.Md 19821018 201001 2 002 b. DEWI RACHMAWATI, A.Md 19751110 201001 2 003	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	SUNAR WIDARTATIK 19760308 200701 2 014	Bendahara Pengeluaran
19	DINAS KESEHATAN:	a. DWI RINASIH 19660401 198711 2 001 b. NUR KHOLIS, A.Md 19781218 201001 1 016	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
20	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN:	a. NURHAIDA FINAHARIE 19710304 199503 2 003 b. LISTIYANI 19850312 201001 2 001	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	a. ARVIA ARI SUGESTI, ST 19920115 201903 2 014 b. BELA ADI SURYA 19860117 201001 1 002	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	CATUR WIDYATMOKO 19820608 200901 1 003	Bendahara Pengeluaran
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP:	a. FITRIA RATNA ANGGRAINI 19820722 201001 2 003 b. AGUNG ARIYADI NUGROHO 19841230 201001 1 003	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	RIBKAH PRASETYANINGSIH 19820628 200801 2 013	Bendahara Pengeluaran
25	DINAS SOSIAL	WEMPY DIAN HAPSARI WINARTO 19821107 201001 2 001	Bendahara Pengeluaran
26	DINAS PERHUBUNGAN:	a. RENING DYAH NURROSIANA, SE 19850609 200901 2 001 b. TRI JAKA SARYONO 19700304 201001 1 004	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BAGUS YULISTIANTO NUGROHO 19840731 201001 1 002	Bendahara Pengeluaran
28	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	TRI SUHARYATI 19741220 200901 2 002	Bendahara Pengeluaran
29	KEC. SINE	SITI ZAMRO'AH 19800220 200701 2 010	Bendahara Pengeluaran
30	KEC. NGRAMBE	BERNADHETA SUYATMI, S.Sos 19800606 200501 2 023	Bendahara Pengeluaran
31	KEC. JOGOROGO	SUPARDI, S.Sos 19700806 200501 1 016	Bendahara Pengeluaran
32	KEC. KENDAL	ALI MURTADLO 19840903 201001 1 003	Bendahara Pengeluaran
33	KEC. GENENG	SUNARMI 19750502 199901 2 001	Bendahara Pengeluaran
34	KEC. KWADUNGAN	MEI MUSTIKA SARI 19840527 201001 2 005	Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4
35	KEC. KARANGJATI	DIAN RANI YUSMAWATI, SH 19810113 200501 2 016	Bendahara Pengeluaran
36	KEC. BRINGIN	NUZULUL HUDIAWANG 19800730 201001 1 005	Bendahara Pengeluaran
37	KEC. PADAS	ARDIANTO PERMONO 19760710 200312 1 008	Bendahara Pengeluaran
38	KEC.NGAWI:	a. DWI HARIYANI 19840201 201001 2 002 b. ASKA MUSANDI WARDHANA 19840524 200701 1 002	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
39	KEC. PARON	NUNUNG SUMIARINI, S.Sos 19650905 199303 2 006	Bendahara Pengeluaran
40	KEC. KEDUNGGALAR	RAHMAD PRIHANTO 19831030 201001 1 004	Bendahara Pengeluaran
41	KEC. PITU	JOKO SUSILO 19830509 201001 1 001	Bendahara Pengeluaran
42	KEC. WIDODAREN	WIDHI ASTUTI KUSUMANINGSIH 19820420 201001 2 003	Bendahara Pengeluaran
43	KEC. MANTINGAN	SUMIYEM 19750705 199703 2 003	Bendahara Pengeluaran
44	KEC. KARANGANYAR	ARI SULISTYOWATI 19800808 200901 2 007	Bendahara Pengeluaran
45	KEC. GERIH	PUDI MARTONO 19800330 200901 1 004	Bendahara Pengeluaran
46	KEC. KASREMAN	SRI HARTATIK 19731201 200701 2 012	Bendahara Pengeluaran
47	KEC. PANGKUR	YULIANA 19851209 201001 2 001	Bendahara Pengeluaran

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO